

SKRIPSI

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL
BATAS ANTAR NEGERI**



Disusun oleh :

**DEANDA REZKY RAMADHANNY
20.M1.0057**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL
BATAS ANTAR NEGERI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh :

**DEANDA REZKY RAMADHANNY
20.M1.0057**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL
BATAS ANTAR NEGERI**

Deanda Rezky Ramadhanny

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Konflik tapal batas antar negeri yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) diawali dengan munculnya adanya kesalahpahaman seperti batas wilayah yang tidak jelas dan tidak adanya surat kepemilikan yang jelas hingga menyebabkan antar masyarakat negeri saling mengakui hak kepemilikan atas batas wilayah di daerah tersebut. Kemudian konflik tapal batas antar negeri yang telah terjadi memberikan dampak yang besar yang menimbulkan korban jiwa serta rusaknya fasilitas umum. Penelitian ini mengangkat tentang manajemen konflik yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah melakukan penyelesaian konflik melalui metode mediasi dan adjudikasi dengan bekerja sama tokoh masyarakat dan Pemerintah Pusat. Metode Penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian memaparkan bahwa konflik tapal batas antar negeri masuk ke dalam konflik sosial, konflik ekonomi, dan konflik antarlingkungan, dengan pemangku kepentingan sekunder yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah, yang telah menjadi mediator dalam melaksanakan manajemen konflik. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah) dalam melaksanakan manajemen konflik kurang berhasil, karena masih terdapat beberapa wilayah yang masih berkonflik hingga sekarang.

Kata kunci : Manajemen konflik, konflik, konflik tapal batas antar negeri, pemangku kepentingan

CONFLICT MANAGEMENT OF THE CENTRAL MALUKU DISTRICT

GOVERNMENT IN RESOLVING INTER-STATE BOUNDARY

CONFLICTS

Deanda Rezky Ramadhanny

Soegijapranata Catholic University

Semarang

ABSTRACT

The inter-country boundary conflict that occurred in Central Maluku Regency (Malteng) began with the emergence of misunderstandings such as unclear territorial boundaries and the absence of clear ownership letters, causing the country communities to recognize each other's ownership rights over the boundaries in the area. Then the boundary conflicts between countries that have occurred have had a major impact, causing casualties and damage to public facilities. This research raises the conflict management carried out by stakeholders, namely the Regional Government of Central Maluku Regency, which has resolved conflicts through mediation and adjudication methods by working with community leaders and the Central Government. The research method that researchers use is explanatory descriptive qualitative. The results of the study explained that the inter-state boundary conflict was included in social conflict, economic conflict, and inter-environmental conflict, with a secondary stakeholder, namely the Central Maluku Regency Government, which had become a mediator in carrying out conflict management. The conclusion of this research is that the stakeholders (the Regional Government of Central Maluku Regency) in implementing conflict management are less successful, because there are still several areas that are still in conflict until now.

Keyword : Conflict management, conflict, border conflict between countries, stakeholders.